## RENCANA KERJA SKPD TA. 2025

#### PENYAJIAN DOKUMEN RENJA



# BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARBARU

**Kata Pengantar** 

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT bahwa dengan limpahan rahmat dan

karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran

rencana tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Banjarbaru Tahun 2021-2025. Rencana kerja BPBD Kota Banjarbaru disusun sebagai

salah satu dokumen perencanaan dan pedoman bagi BPBD sesuai visi, misi, tujuan, strategis,

kebijakan, dan diimplementasikan dalam program dan kegiatan pembangunan terutama

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD sebagai leading sektor dalam penanggulangan

bencana di Kota Banjarbaru. Dokumen ini disusun dengan memperhatikan target pada

renstra, RKPD, RPJM Daerah dan prioritas program pembangunan daerah. Kami mengucapkan

terima kasih kepada semua pihak dilingkungan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD) Kota Banjarbaru yang telah menyusun dokumen rencana kerja tahun 2024 ini.

Harapan kami, dokumen ini dapat memberikan gambaran pelaksanaan tugas pelayanan

publik BPBD Kota Banjarbaru pada tahun 2024, untuk menghadapi dan mencari solusi atas

permasalahan kebencanaan di Kota banjarbaru sehingga bermanfaat bagi seluruh masyarakat

Kota Banjarbaru. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan bimbingan dan kekuatan

kepada kita dalam melaksanakan tugas yang mulia ini.

Banjarbaru, Januari 2025

Kalak BPBD Kota Banjarbaru

ZAINI, S.Sos, MM

Pembina utama muda

NIP: 19701009 200003 1 004

#### **DAFTAR ISI**

Kata Pengantar	2
DAFTAR ISI	3
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.3.2 M a k s u d	8
1.3.2 Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II	10
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BPBD PERUBAHAN TAHUN LALU	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru	38
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru	39
2.4 Review Terhadap Rancangan Renja Perubahan Error! Bookmark not defin	ıed.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	40
BAB III	41
TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARBARU	41
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	41
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perubahan SKPD	41
3.3 Program dan Kegiatan	44
BAB IV	47
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARBARU	47
BAB V	48
DENIITIID	4.Ω

#### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib membuat dokumen rencana pembangunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung SKPD.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dituangkan ke dalam 3 (tiga) jenis dokumen perencanaan yang terkait satu sama lain yang harus dijamin konsistensinya. Dokumen pertama adalah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai dokumen perencanaan dua puluh tahunan, yang kedua adalah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan lima tahunan dan yang ketiga adalah Dokumen Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari rencana kerja perubahan pemerintah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan dokumen Renja SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran serta menunjukkan prakiraan maju sebagai acuan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan tahunan daerah, sehingga diharapkan menghasilkan perencanaan yang bermutu, akuntabel dan tepat waktu serta harus menjamin keterkaitan dan konsistensi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahap terakhir dari RPJMD Kota Banjarbaru 2021-2026. Sedangkan RPJMD 2021-2026 sendiri adalah pelaksanaan 5 (lima tahun) ke-4 dari RPJPD Kota Banjarbaru 2005-2025. Selain berpedoman kepada RPJPD dan RPJMD, penyusunan RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2024 ini juga merujuk

kepada dokumen-dokumen perencanaan baik di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan seperti RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan maupun tingkat nasional yaitu RKP Tahun 2024. RKPD Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi rujukan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi, Serta Uraian Tugas Jabatan berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Serta Uraian Tugas Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru sudah melaksanakan kebijakan pada Bidang- bidang yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru.

Adapun mekanisme penyusunan Renja SKPD dimulai dari penyerapan indikator kinerja program dan kegiatan dan target yang akan dicapai oleh Bidang yang melaksanakan program dan kegiatan dengan tetap mengacu kepada Renstra SKPD, Rancangan Awal RKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, dan kesesuaian dengan Renja K/L dan Renja SKPD Propinsi.

#### 1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum adalah :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung-jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
- 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
- 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
- 14. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 15. Peraturan Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

- Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4663);
- 16. Peraturan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penaggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Noomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
- 23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 11);
- 24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 (Lembar Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 11);
- 25. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kotra Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20);
- 26. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1.3.2 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergisitas perencanaan pembangunan tahunan daerah dan menghasilkan perencanaan pembangunan tahunan yang bermutu, akuntabel dan tepat waktu serta sebagai pedoman penyusunan RKA SKPD.

#### 1.3.2 **Tujuan**

Berdasarkan maksud diatas, Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 bertujuan :

- Menjabarkan program/kegiatan prioritas kedalam strategi yang jitu, arah kebijakan yang fokus secara terinci dan terukur sehingga dapat diimplementasikan.
- 2. Sebagai landasan acuan penetapan indikator kinerja, pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan.
- 3. Membangun profesionalisme aparatur yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dengan etos kerja melayani.
- 4. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Kepala Pelaksana – Kasubbag Tata Usaha dan Kasubbid - Kasubbid yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah KotaBanjarbaru Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

## BAB III : TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARBARU

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KOTA BANJARBARU

BAB V : PENUTUP

#### BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BPBD PERUBAHAN TAHUN LALU

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Bahwa Tahun Anggaran 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru melaksanakan 2 (dua) Program dengan jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 7,372,300,660

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, berdasarkan program yang dilaksanakan tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 1 Evaluasi Program Tahun Anggaran 2024

No.	Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian Kinerja
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.983.078.900	Rp 5.813.085.839	-
2	Penanggulangan Bencana	Rp 5.432.814.100	Rp 4.632.847.725	-

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru tahun 2024 \*(tahun lalu) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini. Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel 2 dengan format tabel sebagai berikut:

Tabel 2

# Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPBD Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)\* Provinsi/Kabupaten/Kota Banjarbaru

Nama Perangkat Daerah : BPBD Kota Banjarbaru

Lembar : ......

angkat	Daerah : BPBD Kota Banjarbaru									Len
		Indikator Kinerja Program (Outcomes)/	Target Kinerja Capaian	Realisasi Target Kinerja Hasil	Target o Program d	lan Realisasi I an Kegiatan T (n-2)	Kinerja 'ahun Lalu	Target program	Perkiraan Rea Target Renstra b rja	SKPD s/d tahun e
-	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Kegiatan (output)	Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)		Realisasi Renja SKPD tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	dan kegiatan tahun 2023(n-1)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023(n- 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						. ,			. , ,
	Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Evaluasi AKIP Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	ВВ	ВВ	ВВ	ВВ	100%	ВВ	ВВ	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja SKPD	- 100%	100%	-	-	-	-	100%	-
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15org/bln	17org/bln	17org/bln	17org/bln	100%	17org/bln	17org/bln	100%
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%

		Indikator Kinerja Program (Outcomes)/	Target Kinerja	Realisasi Target Kinerja Hasil		dan Realisasi an Kegiatan T (n-2)		Target program		SKPD s/d tahun e
-	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Kegiatan (output)	Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target Renja SKPD tahun 2022(n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	dan kegiatan tahun 2023(n-1)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023(n- 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitasi kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	100%
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	1 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya sarana prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	1 unit	1 unit	100%	-	-	-
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	-	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 unit	28 unit	28 unit	28 unit	100%	28 unit	28 unit	100%
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%

		Indikator Kinerja Program (Outcomes)/	Target Kinerja	Realisasi Target Kinerja Hasil		dan Realisasi an Kegiatan T (n-2)		Target program	Perkiraan Rea Target Renstra b rja	SKPD s/d tahun e
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Kegiatan (output)	Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target Renja SKPD tahun 2022(n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	dan kegiatan tahun 2023(n-1)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023(n- 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 unit	-	9 unit	9 unit	100%	9 unit	9 unit	100%
	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase informasi rawan bencana yang tersampaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	200 org	200 org	200 org	200 org	100%	200 org	200 org	100%
	- Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-	-	-		-	-	-	-
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase tertanganinya korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	5 kawasan	5 kawasan	5 kawasan	5 kawasan	100%	5 kawasan	5 kawasan	100%
	- Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	200 orang	-	-	•	-	-	-	-
	- Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1dokumen	1dokumen	1dokumen	1dokumen	100%	1dokumen	1dokumen	100%
	- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1 unit	-	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
	- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	75org	75org	75org	75org	100%	75org	75org	100%
	- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan	2dok	2dok	2dok	2dok	100%	2dok	2dok	100%

		Indikator Kinerja Program (Outcomes)/	Target Kinerja	Realisasi Target Kinerja Hasil	Program d	dan Realisasi l an Kegiatan T (n-2)	,	Target program	Target Renstra b	ilisasi Capaian SKPD s/d tahun ee lan
-	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Kegiatan (output)	Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)		Realisasi Renja SKPD tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	dan kegiatan tahun 2023(n-1)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023(n- 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		tempat tinggalnya								
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase korban bencana yang terselamatkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	5319org	-	-	-	-	-	-	-
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase sistem dasar penanggulangan bencana yang tertata	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
	- Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%

#### Tabel 3

#### RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

#### BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHKOTA BANJARBARU

#### **TAHUN 2025**

N						Urusan / Bidang Urusan /	Indikator Program /	Targe t Akhir Perio	Realis asi Capaia	Prakira an Capaia n		Capaian K	inerja Dan Ke	erangka Penda	anaan		Kelomp		kiraan Maju na Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
0			Ko	de		Program /	Kegiatan / Sub Kegiatan	de	n RENJA	Target					P	Prioritas	ok			
	Registan / Sub Kegiatan         Renst ra OPD Tahun 2023         OPD Tahun 2024         Tau 2024           2         3         4         5         6         7						Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Nasion al	Daerah	- Sasaran	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)					
1			2	!		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						BADAN PENANGG	GULANGAN BENCANA DAERAH	1				10.408.545.39 4,00							9.886.020.687,0 0	
	1					URUSAN PEMERIN	NTAHAN WAJIB YANG BERKAI	TAN DENG	AN PELAY	anan dasa	AR	10.408.545.39 4,00							9.886.020.68 7,00	
	1	0 5				URUSAN PEMERIN PERLINDUNGAN N	NTAHAN BIDANG KETENTERAI MASYARAKAT	MAN DAN	KETERTIBA	MUMU NA	SERTA	10.408.545.39 4,00							9.886.020.68 7,00	
1	1	0 5	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/KO TA	-	-			-	5.921.685.994, 00						-	5.330.089.48 7,00	
		0 5	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	205.864.000,0			-	05. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-	-	149.190.000, 00	
		0 5	0 1	2.0 1	000 1	Penyusunan Doku	imen Perencanaan Perangkat	Daerah									-			

					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	44.096.000,00	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-	8.750.000,00	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
1	0 5	0	2.0 1	000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
					Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-	0,00	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
1	0 5	0	2.0 1	000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
		1	*	3	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang	-	0,00	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
			2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						Adaptif dan Inklusif			

					SKPD dan L Koordinasi Dokumen I				1 Dokumen	0,00	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		05. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-	0,00	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
1 0	2		2.0	000 6	Koordinasi dan Penyusunan La	aporan Capaian Kinerja	dan Ikhtisar Re	alisasi Kiner	ja SKPD								
					Kinerja dar Realisasi Ki Laporan Ha Penyusuna Capaian Kir	Kinerja SKPD dan Iasil Koordinasi an Laporan			3 Laporan	161.768.000,0	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		05. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-	140.440.000,	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
1 (	)		2.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Dae	erah	1		<u>'</u>			<u> </u>	•				
		1	1	7	Jumlah Lap Kinerja Per	poran Evaluasi rangkat Daerah			1 Laporan	0,00	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		05. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat ken Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-	0,00	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH

	5	5 1	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	3.136.964.994, 00			-	05. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-	-	3.766.771.88 7,00	
1	5		2.0	000 1	Penyediaan Gaji da	an Tunjangan ASN											
1	C		2.0	000	Penyedisan Admir	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN nistrasi Pelaksanaan Tugas ASN		19 Orang/bu lan	3.060.318.494, 00	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-		3.716.771.88 7,00	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
1	5		2.0	2	Penyediaan Admir	nistrasi Pelaksanaan Tugas ASN	ı										
			2.0	000		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	0,00	Kota Banjarba ru, Banjarba ru Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-		0,00	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
	C	0 0					Whir Tahun										

					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	34.673.500,00	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	05. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-	25.000.000,0 0	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
1 0 5		) 2.0 1 2	000	Pengelolaan dan	Penyiapan Bahan Tanggapan P	emeriksaan									
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			1 Dokumen	0,00	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	05. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-	0,00	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
1 0	(	) 2.0		Koordinasi dan Pe	enyusunan Laporan Keuangan I	Bulanan/ Triv	vulanan/ Semes	eran SKPD		l.	l .		<u>I</u>		
5		1 2	7		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD			1 Laporan	41.973.000,00	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	05. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-	25.000.000,0 0	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH

													Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif				
1 0 5	) (		000	Rekonsiliasi dan I	Penyusunan Laporan Barang M	lilik Daerah	pada SKPD										
5		3	5		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			4 Laporan	35.000.000,00	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-		35.000.000,0 0	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
1 0 5				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	171.950.000,0 0			-	05. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-	-	215.000.000, 00	
1 0	) (	2.0	000	Pengadaan Pakai		<u>ı l</u> gkapannya			I	I	I		пкизн	1		1	

						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		70 Pake	96.950.000,00	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif			140.000.000,	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
1	0	0	2.0	001	Bimbingan Teknis	Implementasi Peraturan Perundang-Un	dangan										
	5	1	5	1		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		10 Oran	75.000.000,00	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-		75.000.000,0 0	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
	0 5	0	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	505.023.000,0			-	05. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-	-	303.839.700, 00	
		0	2.0	000	Penyediaan Bahar	n Logistik Kantor	<u> </u>	I		1	1	<u> </u>	HIKIUSH	_1	1	<u> </u>	1
		1	6	4													

					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	189.441.000,0 0	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.  Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-	0,00	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
1	0 5	0	2.0 6	000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	O5. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-	37.839.700,0 0	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
1	0 5	0	2.0 6	000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			0	O	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	5.600.000,00	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata	-	6.000.000,00	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
	0		2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif			

						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	244.982.000,0 0	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-		245.000.000,	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
1	0 5	0	2.0 6	001	Penatausahaan Ar	sip Dinamis pada SKPD											
	2	1	O	0		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		12 Dokumen	15.000.000,00	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	O5. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-		15.000.000,0	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
1	0 5	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	364.662.000,0 0			-	O5. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan	-	-	50.000.000,0	
													Inklusif				

					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	140.301.000,0	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-	0,00	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
1	0 5	0	2.0 7	000 5	Pengadaan Mebel									
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	35 Unit	120.924.000,0	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-	0,00	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
1	0	_	2.0	000	December 2									
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
	5	1	2.0	6	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya  Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8 Unit	103.437.000,0	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-	50.000.000,0	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH

						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0 Unit	0,00	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-		0,00	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
1	0 5	0	2.0 7	001 0	Pengadaan Sarana	a dan Prasarana Gedung Kanto	r atau Bang	unan Lainnya										
	3			5		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0 Unit	0,00	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	1	O5. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-		0,00	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
1	0 5	0 1	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-		-	350.750.000,0 0				05. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-	-	3.000.000,00	
1	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa S	L Jurat Menyurat	<u> </u>				1	<u> </u>		ITIKIUSIT			_1	<u> </u>
	5	1	8	1	,	,												

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	3.500.000,00	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	- 05. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-	3.000.000,00	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
1 (		0	2.0 8	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	dan Listrik								
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan	0,00	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	- 05. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif		0,00	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
1 (	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		•					•		
	5	1	8	4	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	347.250.000,0 0	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	- 05. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-	0,00	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH

1	0 5	0 1	2.0	000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	emeliharaan, Biaya Pemelihar.	aan, dan Pajak K	Gendaraan Perorangan Dir	1.151.472.000, 00	Dinas Jabatan		-	05. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-	-	807.287.900, 00	
$\perp \perp \perp$	5	1	9	1	,		,					1	1	T		1	T
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	47.942.000,00	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	O5. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-		47.943.500,0 0	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
1	0 5	0	2.0 9	000	Penyediaan Jasa P	Pemeliharaan, Biaya Pemelihar	aan, Pajak dan P	erizinan Kendaraan Dinas	Operasional atau La	pangan							
	3					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		28 Unit	677.970.000,0 0	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana	-		578.144.400, 00	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
	0	0	2.0	000	Danielikanaa Dan	alatan dan Mesin Lainnya							Bencana				

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			30 Unit	48.000.000,00	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-		0,00	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2.0	000	Pemeliharaan/Rel	habilitasi Gedung Kantor dan B	angunan Lainnya	9					•					
		5	1	9	9		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0 Unit	0,00	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-		0,00	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2.0	001	Pemeliharaan/Rel	ı habilitasi Sarana dan Prasarana	Pendukung Geo	dung Kantor atau	u Bangunan	Lainnya		1	1	IIIKIUSII	ı		1	L
		5	1	9	1		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			5 Unit	377.560.000,0 0	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-		181.200.000, 00	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
2	1	0 5	0 3			PROGRAM PENANGGULAN GAN BENCANA	Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat	100 %		100 %	4.486.859.400, 00						100 %	4.555.931.20 0,00	

	5	0 3	2.0		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kot a	Persentase informasi rawan bencana yang tersampaikan	-		100 %	250.000.000,0				05. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-	-	250.000.000,	
1		0	2.0	000 7	Sosialisasi, Komur	ikasi, Informasi dan Edukasi (k	(IE) Rawan	Bencana Kabu	upaten/Kota (Per	lenis Ancaman Benca	ana)					•		
	5	3		,		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun			200 Orang	250.000.000,0	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		05. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-		250.000.000, 00	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
1	. 0	0	2.0	000 8	Penyusunan Kajia	n Risiko Bencana Kabupaten/K	ota	· ·	<b>'</b>	<b>'</b>	1	•	<u> </u>		ı		•	
			-	3		Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun			0 Dokumen	0,00	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		05. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-		0,00	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH

1	0 5	0 3	2.0 2		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase tertanganinya korban bencana			100 %	1.523.973.100,				05. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif		-	1.746.488.85 0,00	
1	0	0	2.0	001	Pengelolaan Risik	o Bencana Kabupaten/Kota	•	•	•	•	•		•		•		•	•
	5	3	2	3		Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani			0 Kegiatan	0,00	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-		0,00	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
1	0 5	0 3	2.0	001	renyeuldan refali	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	olagadii 19	тпачар вепсана к	9 Unit	307.475.000,0	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan	-		0,00	BADAN PENANGGULAN AN BENCANA DAERAH

						Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota		400 Orang	76.740.000,00	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	O5. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-	79.000.000,0 0	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
1	0 5	0	2.0 2	001 9	Pelatihan Keluarga	a Tanggap Bencana Alam										
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		50 Keluarga	30.000.000,00	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	O5. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-	30.000.000,0 0	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
1		0	2.0	002	Penguatan Kapasit	tas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesia	apsiagaan Bencan	а								
	5	3	2	0		Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Value of the second	2 Kawasan	240.000.000,0	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-	250.000.000, 00	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
1	0 5	0	2.0 2	002 1	i engembangan Ka	apasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Kabupaten/Kula									

					Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	24 Orang	22.759.500,00	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	O5. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-	30.000.000,0	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
1	0 5	0	2.0	002 2	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota									
					Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0 Dokumen	170.001.000,0	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-	170.000.000,	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
1		0	2.0	002	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesia	apsiagaan Terhadap Bencana K	abupaten/Kota			•				
	5	3	2	6	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan	567.000.000,0 0	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata	-	1.033.976.45 0,00	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
1	0	0	2.0	002	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/K						Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif			

						Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun			1 Dokumen	0,00	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	O5. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-		0,00	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
1			2.0	002	Pelatihan Pencega	han dan Mitigasi Bencana Kab	upaten/Kota											
		5 3	2	8		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana			5 Kawasan	109.997.600,0	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-		153.512.400, 00	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
1	_	0 0 5 3	2.0		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase korban bencana yang terselamatkan	-		100 %	1.893.142.000, 00			-	05. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-	-	1.723.132.00 0,00	
1	L C	0 0	2.0	000	Respon Cepat Dar	urat Bencana Kabupaten/Kota	<u> </u>	I	1			I			1	1		l

					Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat			7 Dokumen	0,00	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	M a a F L L L L L L L L L L L L L L L L L	D5. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat Kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan nklusif	-	97.200.000,0 0	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
1 0			2.0	000 3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban B	encana Kabupaten/	'Kota									
		3	3	3	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana			3748 Orang	1.574.657.000, 00	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	N a a F L L H N K E E 4 K K F F F A	D5. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan nklusif		1.225.932.00 0,00	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
1 0	)	0	2.0	000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakua:	si Korban Bencana I	Kabupaten/K	ota			<u> </u>			ll		
5		3	3	9	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			150 Orang	318.485.000,0	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	n a F L H N K E 4 4 k K	D5.  Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kalola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan nklusif	-	400.000.000,	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH

S   S   S   S   S   S   S   S   S   S		5	0 3	2.0		Penataan Sistem Dasar Penanggulanga n Bencana	Persentase sistem dasar penanggulangan bencana yang tertata	100 %	819.744.300,0 0			-	O5. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-	-	836.310.350, 00	
Suman   Suma	1			2.0		Kerja Sama antar	Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggi	ulangan Bencana Kabupaten/Kota									
S   3   4   8   S   S   S   S   S   S   S   S   S							Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana			Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua	AN ASLI DAERAH	-	Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan	-			PENANGGULANG AN BENCANA
Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)  Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kecamat an, Semua Kel/Desa  Kota Banjarba AN ASLI DAERAH (PAD) Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	1					Bimbingan Teknis	Pasca Bencana Kabupaten/Kota										
				•	3		Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian	50 Orang	0,00	Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua	AN ASLI DAERAH	-	Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan	-			PENANGGULANG AN BENCANA

							Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan			1 Kegiatan	124.867.300,0 0	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	O5. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-	100.988.950,	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
	1 0	0	0	2.0 4	001 1	Peningkatan partis	sipasi masyarakat dan dunia usa	aha dalam i	penanganan Pasca	bencana Kabi	ipaten/Kota							
	5	5	3	4	1		Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal			40 Lembaga	55.000.000,00	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif		58.000.000,0	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
:	1 0	0	0	2.0	001	Penyusunan Kajian	 n Kebutuhan Pascabencana (JIT	UPASNA) da	an Rencana Rehab	ilitasi dan Rek	ontruksi Pascaben	cana (R3P) K	l ab/Kota					
	5	5	3	4	5	<u> </u>	1 1	1			0.00	12.1.	DENIG 121=		25	<u> </u>	75 000 000 0	I BABAN
							Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun			0 Dokumen	0,00	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		05. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan		75.000.000,0	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH

												Inklusif			
1 0 5			001	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar P  Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	elayanan Minin	mal (SPM) Sub U	rusan Bencan 1 Dokumen	60.000.000,00	Kota Banjarba ru, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Meningkatk an Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 4.Meningkat kan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-	, ,	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
	JUMLAH					10.408.545.39 4,00						9.886.020.687,0	00		

#### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang disusun dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*.

Analisis kinerja pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan disesuaikan dengan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik dengan mengakomodir permasalahan dan kebutuhan dari setiap SKPD di lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

**Tabel 3**.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPBD
Provinsi/Kabupaten/Kota Banjarbaru

H H		SPM/		Targ	katDaeral	1	Realisasi Capaian		Pro	yeksi			
NO	Indikator	standar Nasional	IKK	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Catatan Analisis
				2022 (thn n-2)	2023 (thn n-1)	2024 (tnn n)	2025 (thn n+1	2026	2022 (thn n-2)	2023 (thn n-1)	2025 (tnn n)	2026 (thn n+1)	
					` ,	,	,						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Cakupan Pelaksanaan Penanggulan gan Bencana Dan Tanggap Darurat		Cakupan Pelaksanaan Penanggulan gan Bencana Dan Tanggap Darurat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

# 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja SKPD, isu – isu penting yang terkait dengan hal tersebut adalah :

No.	AKAR MASALAH		Isu Strategis
	1. Belum optimalnya koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penanganan bencana kebakaran dan non kebakaran 2 Masih kurangnya sarana prasarana penanggulangan bencana 3 Belum optimalnya pemberian bantuan korban pasca bencana 4. Masih terbatasnya studi, kajian atau analisis risiko bencana.	1.	Belum optimalnya penanggulangan bencana

Tersedianya dan terpublikasinya data atau informasi pelayanan melalui elektornik/internet dalam blog : bpbd.banjarbarukota.go.id dapat menggambarkan sejauh mana tingkat kinerja pelayanan yang telah diberikan dan memberi informasi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pegawai serta menampung dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan pengembangan aparatur formulasi isu-isu penting berupa usulan, rekomendasi dan catatan yang strategis dapat ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas yang direncanakan.

#### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Kajian usulan program dan kegiatan Masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja SKPD.

Program dan kegiatan yang diusulkan dalam rangka pengembangan aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan sifatnya tidak ada perubahan,

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; Sajikan Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Nama Perangkat Daerah : BPBD Kota Banjarbaru

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Besaran/	Catatan
NO	1 Togram/ Kegiatan	LUKASI	Kinerja	Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Banjarbaru	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	100%	
	Adminstrasi keuangan perangkat daerah	Banjarbaru	Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	
	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	Banjarbaru	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitasi kinerja	100%	
	Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Banjarbaru	Meningkatnya sarana prasarana aparatur	100%	
	Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Banjarbaru	Cakupan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah yang difasilitasi	100%	
	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Banjarbaru	Meningkatnya sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	
	Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/k ota	Banjarbaru	Cakupan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	
	Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaa n terhadapbencana	Banjarbaru	Cakupan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	
	Kegiatan pelayanan dan evakuasikorban bencana	Banjarbaru	Cakupan tertanganinyakorban bencana	100%	
	Kegiatan system dasar penanggulangan bencana	Banjarbaru	Cakupan terdatanya korban bencana yang terdampak	100%	

# BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARBARU

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang – undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana mengamanatkan berjalannya upaya – upaya penangulangan bencana baik pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana sehingga terbentuklah Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB)di tingkat pusat dengan Undang – undang Nomor 22 Tahun 2008 danBadan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibentuk di Tingkat Daerah bertugas mengurus dan merencanakan program – program penangulangan bencana di tingkat daerah dengan berpedoman pada aturan – aturan yang sudah ada.

Berdasarkan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional terdapat 7 (Tujuh) point, poin yang ke empat adalah Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Perubahan Iklim. Arah kebijakan tersebut dapat ditempuh melalui peningkatan pemantauan kwalitas lingkungan dan penegakan hukum pencemaran lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, dan memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. arah kebijakan tersebut menjadi pedoman rujukan dalam penyusunan program – program yang tertuang di dalam RPJMN Daerah maupun Rencana Strategis SKPD BPBD dan Instansi yang terkait lainnya yang dijabarkan dalam program dan kegiatan tahunan SKPD.

### 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perubahan SKPD

#### Visi dan Misi SKPD

Visi pembangunan daerah dalam RJPMD kota Banjarbaru Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama lima tahun. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Banjarbaru, maka visi pembangunan daerah yang hendak dicapai dalam periode 2021 – 2026 adalah:

Visi : BANJARBARU MAJU,AGAMIS,DAN SEJAHTERA (BANJARBARU JUARA)."

Visi pembangunan kota banjarbaru 2021 – 2026 tersebut sebagai bentuk komitmen Pamerintah Daerah tahun 2021 – 2025 yakni :

" TERWUJUDNYA BANJARBARU SEBAGAI KOTA EMPAT DIMENSI YANG MANDIRI DAN TERDEPAN". yakni Kota pendidikan, Kota jasa, Industri dan perdagangan, Kota permukiman dan Kota Pamerintahan yang mendiri dan terdepan.

BANJARBARU MAJU adalah cerminan dari komitmen yang dibangun untuk menjadikan kota Banjarbaru mempunyai daya saing dengan daerah lainnya melalui pengembangan segala potensi.

BANJARBARU MAJU lebih kepada jawaban terhadap tujuan periotas yang

harus dicapai dalam pembangunan jangka menengah tahap ke V RPJPD Kota Banjarbaru tahun 2021 – 2025 yakni mewujudkan Banjarbaru sebagai daerah terdepan di Kalimantan Selatan, terutama dibidang pendidikan, perdagangan, industry pengolahan dan jasa, pamerintahan dan permukiman.

BANJARBARU AGAMIS dapat dimaknai bahwa masyarakat kota Banjarbaru yang berakhlak mulia adalah salah satu syarat untuk memberikan landasan bagi terwujudnya masyarakat yang agamis dan berbudi pekerti luhur

BANJARBARU SEJAHTERA Sebagai prioritas dalam visi pembangunan kota Banjarbaru 2021-2025 hal ini sudah sesuai dengan tujuan RPJPD Kota Banjarbaru 2005 – 2025 yakni masyarakat / SDM yang berkualitas, menumbuh kembangkan ekonomi daerah, lingkungan yang sehat dan dinamis serta pamerintahan yang baik.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya upaya apa yang harus dllakukan . Dalam suatu dokumen perencanaan. Rumusan misi sangat penting untuk memberikan kerangka tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dicapai visi serta perubahan pradigma dan kondisi yang dihadapi pada masa yang akan datang dalam mewujudkan visi pembangunan kota Banjarbaru tahun 2021 – 2026, maka ditetapkan misi pembangunan kota Banjarbaru Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sejahtera dan berakhlak mulia.
- 2.Meningkatkan pembangunan perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan kearifan local dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
  - 3. Mewujudkan tata kolola pemerintahan yang amanah Tujuan dan Sasaran.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukan tingkat perioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan . Perumusan tujuan dan sasaran rencana strategis seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Kota Banjarbaru untuk preode tersebut. Tujuan adalah pernyataan tentang hal yang diperlukan untuk mencapai visi melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, Rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka lima tahun kedepan.

Berkaitan dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 -2026, maka misi yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi BPBD Kota adalah misi yaitu " MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA"

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra BPBD Kota Banjarbaru, dengan dokumen RPJMD 2016 – 2021, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indicator kinerja BPBD Kota Banjarbaru harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan BPBD yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

# Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan visi dan misi BPBD Kota Banjarbaru tersebut di atas, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD dalam jangka menengah diuraikan sebagai berikut :

MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Sejahtera dan

Berakhlak Mulia.

Tujuan-1 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya

Saing Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya

Sasaran-1 : Meningkatnya penanganan kebencanaan

Program : 1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah

kabupaten/kota

2. Program penanggulangan bencana

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi	Target
		•			2024	2025
	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya penanganan kebencanaan	Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Dan Tanggap	100 %	100 %

#### 3.3 Program dan Kegiatan

Program yang ditetapkan Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada tahun 2024 adalah 2 (dua) program yaitu

- 1. Program Penungjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
  - a. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
    - i. Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
    - ii. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
    - iii. Sub kegiatan kooridnasi dan penyusunan DPA-SKPD
    - iv. Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
    - v. Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah
  - b. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah
    - i. Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
    - ii. Sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
    - iii. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahunSKPD
    - iv. Sub kegiatan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
    - v. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keunganbulanan/triwulanan/semesteran SKPD
  - c. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah
    - i. Sub kegiatan penyediaan bahan logistic kantor
    - ii. Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengadaan
    - iii. Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
    - iv. Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundag-undangan
    - v. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
  - d. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahdaerah
    - i. Sub kegiatan pengadaan mebel
    - ii. Sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional
    - iii. Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya
  - e. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
    - i. Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
    - ii. Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
  - f. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahdaerah
    - Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan danpajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
    - ii. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biayapemeliharaan,pajakdan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
    - iii. Sub kegiatan pemeliharaan peralata dan mesin lainnya

- iv. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi saranadan prasaranapendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
- g. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
  - i. Sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- h. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - i. Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
  - Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 2. Program Penanggulangan Bencana
  - a. Kegiatan Pelayanan Informasi rawan bencana kabupaten/kota
    - i. Sub kegiatan Sosialisai, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
       RawanBencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
  - b. Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencanakabupaten/kota
    - i. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan
       Terhadap Bencana kabupaten/kota
    - ii. Sub kegiatan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
    - iii. Sub Pelatihan keluarga tanggap bencana Alam
    - iv. Sub kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
    - v. Sub kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota
    - vi. Sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
    - vii. Sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
  - c. Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
    - i. Sub kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
    - ii. Sub kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
    - iii. Sub kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
  - d. Kegiatan penataan system dasar penanggulangan bencana
    - i. Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
    - ii. Sub kegiatan Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota
    - iii. Sub kegiatan Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
    - iv. Sub kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
    - v. Sub kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota

# Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut: Tabel 6.

# Rumusan rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

# Nama Perangkat Daerah : BPBD Kota Banjarbaru

lembar ..... dari ......

No	Rancangan awal F				1	Hasil Analisis keh			1	T	Catatan
	Program/ kegiatan	Indikator kinerja	Lokasi	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ kegiatan	Indikator kinerja	Lokasi	Target capaian	PKebutuhan dana	penting
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	ВЈВ	100%	250.000.000	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	ВЈВ	100%	250.000.000	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	ВЈВ	100%	1.174.269.600	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	ВЈВ	100%		
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan tertanganinya korban bencana	ВЈВ	100%	1.893.142.000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan tertanganinya korban bencana	ВЈВ	100%	1.893.142.000	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan terdatanya korban bencana yang terdampak	ВЈВ	100%	819.744.300	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan terdatanya korban bencana yang terdampak	ВЈВ	100%	819.744.300	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja SKPD yang resfonsif gender	ВЈВ	100%	202.864.300	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja SKPD yang resfonsif gender	ВЈВ	100%	202.864.300	
	Administrasi umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitasi kinerja	ВЈВ	100%	473.839.000	Administrasi umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitasi kinerja	ВЈВ	100%	473.839.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah	ВЈВ	100%	3.133.974.994	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah	ВЈВ	100%	3.133.974.994	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya sarana prasarana aparatur	ВЈВ	100%	320.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya sarana prasarana aparatur	ВЈВ	100%	320.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dae	Meningkatnya jasa jasa penunjang urusan pemerintah daerah	ВЈВ	100%	358.128.700	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dae	Meningkatnya jasa jasa penunjang urusan pemerintah daerah	ВЈВ	100%	358.128.700	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya sarana prasarana aparaturdalam kondisi baik	ВЈВ	100%	1.106.087.946	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya sarana prasarana aparaturdalam kondisi baik	ВЈВ	100%	1.106.087.946	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	ВЈВ	100%	35.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	ВЈВ	100%	35.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan disiplin aparatur	ВЈВ	100%	171.950.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan disiplin aparatur	ВЈВ	100%	171.950.000	

## BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARBARU

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi satuan kerja pelaksana program, RKPD Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2025 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025 benarbenar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu seluruh satker mulai membuat rencana aksi dalam upaya penggalian dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari masyarakat ataupun dunia usaha. Mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan dengan model BOT, leasing, konsensi dan lain sebagainya. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan.

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2025 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah

Kota Banjarbaru memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang

terukur dan output rencana kerja adalah ProgramTahunan yang sesuai dengan

Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan dan

Bencana Daerah Kota Banjarbaru.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Kota

Banjarbaru selain menjadi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2023

oleh seluruh jajaran Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Kota Banjarbaru

berfungsi juga sebagai sarana peningkatan kinerja serta memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana

dimasa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan

Penanggulangan dan Bencana Daerah Kota Banjarbaru sehingga akan diperoleh

peningkatan kinerja yang lebih baik dimasa akan datang.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah

Kota Banjarbaru menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai

persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan khususnya

pembangunan manusia terkait dengan pengembangan aparatur dan peningkatan

kualitas pelayanan kepegawaian dalam menciptakan Good Gavernance.

Banjarbaru, Januari 2025 Kepala Pelaksana BPBD, Kota Banjarbaru

Zaini, S.Sos,MM

Pembina utama muda NIP. 19701009 200003 1 004